

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA BESI  
DENGAN INVESTOR  
(Studi Kasus Tentang Sengketa pada Perusahaan Dhemes di Sukoharjo)**

**NASKAH PUBLIKASI**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Disusun Oleh:**

**SANDHY CAHYA PRATAMA**  
**NIM: C 100 110 104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVRSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu .

Tanggal : 24 - Februari - 2016.

Pembimbing I



(Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn.)

Pembimbing II



(Darsono, S.H., M.H)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA BESI  
DENGAN INVESTOR  
(Studi Kasus Tentang Sengketa pada Perusahaan Dhemes di Sukoharjo)**

Sandhy Cahya Pratama  
C.100.110.104  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
[sandhy.cahya@gmail.com](mailto:sandhy.cahya@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian yang dibuat antara pengusaha besi dengan investor yang sudah menjalankan kerjasama dan untuk mengetahui cara pengusaha tersebut mengembalikan modal investor yang telah ditanamkan dalam usahanya dan akan diminta kembali oleh investor tersebut. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat antara pengusaha besi dengan investor yang sudah menjalankan kerjasama dengan cara menanamkan modal pada perusahaan Dhemes belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHP mengenai syarat sahnya perjanjian, di mana investor hanya tertuju pada janji akan didapatkan setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- dengan tidak terlalu memikirkan resiko serta tidak begitu teliti dan cermat mengenai pentingnya sebuah perjanjian yang sah. Sedangkan pengembalian modal yang telah ditanamkan oleh investor, pengusaha tidak sanggup mengembalikan modal investor dengan cash, tetapi dicicil atau diangsur selama satu bulan sekali hingga lunas.

***Kata kunci: pengusaha besi, modal investor, pengembalian modal***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the agreement made between the entrepreneur iron with investors already running cooperation and to determine how these businessmen to return capital to investors who have invested in the business and would be reclaimed by the investor. The research method using empirical juridical approach to the descriptive nature of the research. Data sources include primary data, interviews and secondary data sources include primary and secondary law. Data were collected by literature study and interviews. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that the agreement made between the entrepreneur iron with investors already running cooperation by way of investing in Companies Dhemes not comply with the provisions of Article 1320 Penal Code regarding the terms validity of the agreement, in which investors are only focused on the promise will get every month is Rp 25,000.000, - with not too concerned about risks as well as the not so thorough and meticulous about the importance of a legal agreement. While the return on capital that has been invested by the investor, the entrepreneur is not able to return capital to investors with cash, but paid in installments or installments for one month until paid.

***Keywords: employers iron, investor capital, return on capital***

## PENDAHULUAN

Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.<sup>1</sup> Kegiatan penanaman modal bukanlah hal yang baru dalam peradaban manusia. Karena sedah sejak zaman dahulu masyarakat sudah melakukan berbagai bentuk investasi. Hanya saja pada zaman dahulu masyarakat melakukan investasi dalam bentuk investasi yang dilakukan secara langsung seperti: investasi dalam pembelian ternak, pembelian tanah pertanian, atau investasi dalam pembuatan perkebunan dan lain sebagainya.

Syarat-syarat perjanjian lisan atau tulisan berbeda pentingnya dan dapat diklasifikasikan menjadi syarat pokok (*condition*), dan syarat pelengkap (*warranty*). Syarat pokok (*condition*) adalah syarat yang penting, yang merupakan syarat vital bagi setiap perjanjian, sehingga tidak adanya ketaatan akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan, hak untuk membatalkan atau melepaskan perjanjian itu. Secara alternatif pihak yang dirugikan itu jika menginginkan dapat meneruskan perjanjian itu tetapi memperoleh penggantian bagi kerugian yang telah dideritanya.<sup>2</sup>

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seorang atau beberapa orang mengikatkan diri untuk sesuatu hak terhadap seseorang beberapa orang lainnya.”

---

<sup>1</sup>Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 1997, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, hal 45.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, hal. 140

Kenyataannya, biasanya perjanjian hanya dibuat semata-mata hanya untuk sebagai pelengkap agar supaya kerjasama terlihat sempurna, walaupun tidak menggunakan perjanjian secara tertulis namun dapat juga perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan saja, karena dalam pelaksanaannya biasanya seorang pengusaha yang ingin memiliki modal besar dan tidak mengeluarkan biaya sendiri, melakukan berbagai cara dengan cara menggembor-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.

Menurut Pasal 1338 BW, perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat para pihak seperti halnya undang-undang dan asas konsensualisme sudah tercakup dalam Pasal tersebut. “Perjanjian” kini diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, dalam sebuah perjanjian khususnya dalam sebuah perjanjian yang menyangkut antara kedua belah pihak, yaitu orang yang satu dengan yang lain, hendaklah kedua belah pihak mampu dan wajib membuat sebuah perjanjian yang sah, diantaranya seperti, perjanjian kerjasama, perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain, harus didasari dengan sebuah perjanjian yang sah, atau dalam arti sebuah perjanjian yang memiliki nilai hukum sehingga kemungkinan kecil untuk melakukan kejahatan dalam sebuah kerjasama misalnya, akan sedikit mengurangi hal tersebut terjadi, dan kedua belah pihak yang bersangkutan dalam kerjasama tersebut kemungkinan besar akan tunduk pada perjanjian yang dibuat.

---

<sup>3</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Bale Bandung, hal. 9

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian yang dibuat antara pengusaha besi dengan investor yang sudah menjalankan kerjasama dan untuk mengetahui bagaimana cara pengusaha tersebut mengembalikan modal investor yang telah ditanamkan dalam usahanya dan akan diminta kembali oleh investor tersebut.

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perjanjian yang Dibuat Antara Pengusaha Besi Dengan Investor yang Sudah Menjalankan Kerjasama**

Sebuah perjanjian tentulah sangat penting bagi orang yang melakukan sebuah hubungan hukum atau secara umum dikatakan dalam melakukan sebuah kerja sama, karena kerjasama inilah yang mengikatkan kedua belah pihak tersebut untuk menjalankan sebuah hubungan hukum. Antara pengusaha dengan investor hendaklah dalam kerjasama semacam ini perlu dibuat sebuah perjanjian khususnya, perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak, seorang investor diuntungkan oleh pengusaha sedangkan pengusaha juga diuntungkan oleh investor. Karena jika tidak ada perjanjian yang dibuat sebuah kerjasama tersebut seakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat antara satu dengan yang lainnya (antara pengusaha dengan investor).

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang

dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.<sup>4</sup>

Pengertian perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.<sup>5</sup>

R. Subekti, menyatakan “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan secara lisan maupun tertulis”.<sup>6</sup>

Apabila dalam perjanjian, pihak berwajib tidak memenuhi janji, dengan perkataan lain kalau ada wanprestasi dari pihak berwajib, maka barangkali pihak berhak masih dapat menuntut pelaksanaan dari perjanjian. Tetapi ada kalanya ini tidak mungkin, baikpun karena pihak berwajib tidak mempunyai alat-alat atau bahan-bahan untuk memenuhi janjiaupun oleh karena pihak berwajib tidak mau memenuhi janji, sedang paksaan langsung terhadap badan seorang pihak berwajib.<sup>7</sup>

Berinvestasi secara langsung diperlukan modal yang besar serta tempat yang harus memadai juga, sehingga menyulitkan untuk pihak-pihak yang mempunyai modal dan tempat yang kecil untuk melakukan investasi juga. Mengatasi hal tersebut, di tengah perkembangan investasi yang semakin cepat

---

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hal. 117

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1313

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1994) hal 1

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 51

maka mulai dikenal dengan pasar modal, yaitu tempat untuk mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang kekurangan modal. Seiring dengan perkembangan zaman, modal yang diinvestasikan dilakukan dengan melihat bagaimana kemajuan usaha tersebut dan apakah usaha tersebut sukses atau tidak, maka seorang investor baru menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya, maka seorang investor seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya, sehingga akan adil jika adanya sebuah perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak antara investor dengan pengusaha yang melakukan sebuah kerjasama, sehingga tidak hanya investor saja yang terikat ada pengusaha, namun pengusaha pun juga akan terikat dengan investor untuk bisa saling bekerja sama sesuai dengan yang diharapkan, dan dengan adanya sebuah perjanjian maka untuk menjalankan sebuah kerjasama pun akan terjalin dengan baik dan sepiantasnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perjanjian tidak dapat dilakukan hanya dengan sebuah kepercayaan saja, namun sebuah perjanjian harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan, dan disaksikan oleh beberapa saksi, dengan demikian jika pihak investor mengadakan sebuah perjanjian, hendaknya dengan sebuah perjanjian yang benar dan tepat untuk melakukan sebuah perjanjian, seperti lain halnya perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan investor, dimana kedua belah pihak harus sepakat untuk melakukan perjanjian, dan pihak pengusaha pun juga harus sepakat dan konsekuen menjalankan investasi yang diinvestasikan dari pihak investor terhadap pihak pengusaha.



Pengusaha pada awalnya memiliki niat baik untuk mengajak investor menanamkan modal di perusahaannya agar usahanya lebih berkembang dan dapat memberikan hasil kepada investor yang telah menanamkan modal kepadanya, namun di dalam hubungan kerjasama tersebut tidak memiliki sebuah kepastian hukum yaitu yang berwujud sebuah perjanjian yang sah, atau perjanjian tertulis atau yang nyata yang dapat dijadikan sebagai pegangan antara kedua belah pihak bahwa mereka telah melakukan perikatan dalam sebuah kerja sama.<sup>8</sup>

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, perjanjian dapat dibuat secara lisan ataupun juga secara tertulis, ketentuan ini dibuat secara langsung akan menjadi suatu bukti apabila telah melakukan perjanjian, jika dikemudian hari terjadi sebuah perselisihan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian atau melakukan perjanjian. Namun ada pula beberapa perjanjian yang ditentukan oleh bentuknya, oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Syarat sahnya sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berbunyi: Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal.<sup>9</sup>

Setiap usaha maupun kerjasama, baik kerjasama penanaman modal, kerjasama membangun usaha, pasti memiliki resiko atau kejanggalan, dalam hal ini maka perlunya sebuah perjanjian dibuat dalam hal kerjasama, baik itu

---

<sup>8</sup>Bapak Kustanto, Pengusaha Besi di Perusahaan Dhemmes Tejomoto Danukusuman Grogol Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Grogol, Senin, 12 Oktober 2015, pukul 16.00 WIB

<sup>9</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1320

perjanjian tertulis maupun tidak tertulis karena perjanjian memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kerjasama baik antara pengusaha dengan investor, ataupun antara pegawai dan atasan, dan lain-lain.

Berdasarkan data primer yaitu hasil wawancara dapat ditarik sebuah garis besar, bahwa seorang investor hanya mengandalkan sebuah kepercayaan saja dalam kerja samanya yang dilakukan dengan seorang pengusaha besi di Perusahaan Dhemes, tidak ada perjanjian yang mengikat secara sah atau secara hukum atau secara tertulis, dalam kerja sama tersebut melainkan hanya dari kata-kata yang diucapkan oleh pengusaha tersebut yang ditujukan kepada investor bahwa ia akan memberikan hasil dari modalnya yang telah ditanamkan di perusahaannya, dengan sebagai janjinya seorang pengusaha besi tersebut akan memberikan hasil sebanyak Rp. 25. 000. 000, - di setiap bulannya. Namun seiring berjalannya waktu dalam jangka panjang, kerja sama tersebut tidak berjalan lancar sesuai yang di harapkan oleh investor sehingga mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Secara hukum atau secara teori menurut Abdulkadir Muhamad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>11</sup>

Salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian adalah bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana di atur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang pada intinya menegaskan bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

---

<sup>10</sup>Sri Lestari, Investor di Perusahaan Dhemes Madegondo Grogol Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Grogol, Minggu, 11 Oktober 2015, pukul 15.30 WIB.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990) hal 78

Sebagaimana perlu diketahui bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi orang atau masyarakat, maka untuk mencapai tujuan tersebut hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian, kegunaan dan keadilan.

Mengingat kasus yang dibahas di atas perlu kita ulas yang menyangkut pada Pasal 1338 KUHPerdata sebagai dasar hukum sebuah perjanjian kerja sama dalam membagi hasil. Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>12</sup> Menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Prakteknya antara seorang investor dan pengusaha besi tersebut di atas tidak melakukan perjanjian yang sah, tidak melakukan perjanjian yang berkekuatan hukum, maka dalam pelaksanaannya perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besi dengan investor tersebut menjadi rumit endingnya.

Tidak lengkapnya sebuah perjanjian yang seharusnya dibuat oleh pihak yang melakukan hubungan kerja sama tersebut atau kurang sahnya sebuah perjanjian yang di buat dalam kerja sama tersebut misalnya. Apabila dengan hanya serangkaian kata yang di uraikan untuk memberikan sebuah janji kepada satu sama lainnya maka perjanjian yang dibuat tersebut tetap sah namun tidak memiliki kekuatan hukum sepenuhnya karena hanya bertumpu pada sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Dengan hal tersebut seorang pengelola sebuah usaha wajib dan mampu untuk mempertanggung jawabkan janji yang telah diuraikan tersebut, karena bagaimanapun juga hal

---

<sup>12</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1338

tersebut telah menjadikan sebuah bukti bahwa apabila seseorang yang melakukan perjanjian atau mengikatkan dirinya antara satu sama lain berarti orang tersebut telah melakukan hubungan hukum.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada Perusahaan Dhemes, di mana investor yang melakukan kerjasama dengan cara menanamkan modal pada sebuah Perusahaan Dhemes tidak melakukan pembuatan surat perjanjian secara sah, yaitu belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHP di mana isinya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, pada awal memulai sebuah hubungan kerjasama tidak ada kontrak atau perjanjian yang sah untuk mengikat kedua belah pihak sehingga menjadikan kedua belah pihak mengalami problem soal perjanjian dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Investor juga kurang atau bahkan belum menguasai soal bisnis dan belum menguasai pula mengenai arti dari sebuah perjanjian yang benar dan sah menurut hukum, sehingga dalam prakteknya investor hanya tertuju pada janji yang disampaikan oleh pengusaha di perusahaan Dhemes tersebut mengenai untung yang akan didapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan investor tidak terlalu memikirkan apa resiko yang akan dihadapi kedepannya dan investor tidak begitu teliti dan cermat soal pentingnya sebuah perjanjian yang sah dalam melakukan hubungan hukum dengan orang lain.

#### **Cara Pengusaha Mengembalikan Modal Investor yang Telah Ditanamkan dalam Usahanya dan akan Diminta Kembali oleh Investor**

Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Jika sesuatu tersebut tidak dipenuhi dan ditepati, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab tersebut perbuatannya dapat diuntut dan dapat di mintakan pertanggung jawabannya. Sama halnya Jika seorang investor membuat sebuah perjanjian dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara merugikan investor yang tidak mengenal hukum, maka investor dapat menuntut haknya untuk diminta kembali, karena mengingat perjanjian yang dibuat semata-mata hanya perjanjian yang sekedar dibuat asal cocok saja satu sama lain dan serangkaian kata-kata yang diuraikan oleh pengusaha.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu sebuah kerjasama yang kini menjadi sebuah harapan yang besar dan yang banyak diminati oleh orang-orang yang ingin menambah penghasilannya, hendaknya dalam pelaksanaannya dapat lebih diteliti kembali mengenai untung dan ruginya dan lebih diteliti jika dalam membuat sebuah perjanjian, agar dapat meminimalkan resiko yang akan terjadi kedepannya, sehingga dalam prosesnya tidak akan ada yang merasa dirugikan.

Jika seseorang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut berarti telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, jika perbuatan wanprestasi tersebut di laporkan ke pengadilan atau kepada pihak yang berwajib, maka akibat dari perbuatan seseorang yang melakukan wanprestasi tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan pemberian hukuman akan sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam Pasal yang telah dilanggarnya. Jika dalam

---

<sup>13</sup>Bapak Kustanto, Pengusaha Besi di Perusahaan Dhemas Tejomoto Danukusuman Grogol Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Grogol, Senin, 12 Oktober 2015, pukul 16.00 WIB

membuat suatu perjanjian tidak ada kriteria yang telah di cantumkan oleh Pasal 1330 KUHPerdata maka perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.

Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian, dari suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak para pihak yang berjanji akan menimbulkan prestasi. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>14</sup> Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak. Untuk mengatakan bahwa pihak tersebut salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah menyatakan setiap orang yang melakukan hubungan hukum, hendaknya di dasari dengan dasar dan peraturan dari undang-undang yang telah di tetapkan, karena akan lebih menguatkan keduanya dari segi hukum dan tentu di antara satu sama lain tidak akan memiliki niat untuk melakukan pelanggaran hukum jika sudah mengetahui akibat hukumnya dan mengetahui konsekuensinya.

Jika sebuah hubungan hukum dibuat berdasarkan dengan undang-undang, tentu akan meminimalkan kesalahan-kasalahan yang terjadi yang di anggap tidak sah dimata hukum, oleh sebab itu wajib jika seorang manusia untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan perjanjian, dan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Jika kita menguasai hal yang demikian, khususnya orang-orang yang

---

<sup>14</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Subekti dan Tjitrosudibio, Pasal 1234

memiliki pekerjaan berbisnis, tentu akan melancarkan bisnis dan investasinya sehingga tidak akan terjadi kesalahan dimata hukum dan tidak akan di bodohi oleh orang lain mengenai pentingnya sebuah hukum, terkhusus (Hukum Perjanjian) karena terkait dengan teori yang telah di uraikan dan dibahas di atas mengenai perjanjian kerjasama antara pengusaha besi dengan investor.

Perusahaan Dhemmes yang sebelumnya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sukses dalam bisnisnya kini telah mengalami bangkrut atau gulung tikar dan pada saat itu pengusaha sudah tidak dapat memberi hasil dari modal yang telah di investasikan di perusahaannya oleh investor, sehingga investor ingin meminta kembali modal yang telah ditanamkannya karena merasa tidak ada penghasilan lagi seperti sebelum sukses saat itu. Dalam pengembalian modal yang telah ditanamkan oleh investor kepada pengusaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengusaha tersebut memiliki niat baik untuk mengembalikan modal yang telah ditanamkan oleh investor, namun pengusaha tidak dapat menyanggupi mengembalikan modal investor secara lunas atau *cash* namun dengan cara dicicil atau diangsur selama satu bulan sekali hingga lunas.<sup>15</sup>

Sebuah hubungan hukum usahakan memiliki dasar yang kuat dan sah didalamnya, sehingga minim untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang sesuai yang telah ditetapkan. Karena sebuah kerjasama adalah sebuah hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dimana keduanya akan melakukan sesuatu hal yang dapat menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Akan memberikan sesuatu yang terbaik dan tentunya yang dapat memuaskan dirinya, karena sebuah kerjasama sudah tidak lazim lagi dalam kalangan masyarakat, siapapun orang itu yang

---

<sup>15</sup>Sri Lestari, Investor di Perusahaan Dhemmes Madegondo Grogol Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, Grogol, Minggu, 11 Oktober 2015, pukul 15. 30 WIB.

memiliki niat untuk melakukan kerjasama maka kerjasama tersebut dapat dilakukan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Pertama*, investor yang melakukan kerjasama dengan cara menanamkan modal pada sebuah Perusahaan Dthemes tidak melakukan pembuatan surat perjanjian secara sah, yaitu belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHP di mana isinya yaitu mengenai syarat sahnya perjanjian, pada awal memulai sebuah hubungan kerjasama tidak ada kontrak atau perjanjian yang sah untuk mengikat kedua belah pihak sehingga menjadikan kedua belah pihak mengalami problem soal perjanjian dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Investor juga kurang atau bahkan belum menguasai soal bisnis dan belum menguasai pula mengenai arti dari sebuah perjanjian yang benar dan sah menurut hukum, sehingga dalam prakteknya investor hanya tertuju pada janji yang di sampaikan oleh pengusaha di Perusahaan Dthemes tersebut mengenai untung yang akan didapatkan setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- dan investor tidak terlalu memikirkan apa resiko yang akan dihadapi kedepannya dan investor tidak begitu teliti dan cermat soal pentingnya sebuah perjanjian yang sah dalam melakukan hubungan hukum dengan orang lain.

*Kedua*, Pengembalian modal yang telah ditanamkan oleh investor kepada pengusaha tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengusaha tersebut memiliki niat baik untuk mengembalikan modal yang telah ditanamkan oleh investor, namun pengusaha tidak dapat menyanggupi mengembalikan modal investor secara lunas atau *cash* namun dengan cara dicicil atau diangsur selama satu bulan sekali hingga lunas.



## **Saran**

*Pertama*, bagi setiap subjek hukum yang akan mengadakan suatu perjanjian atau mengadakan sebuah hubungan kerjasama atau hubungan apapun itu yang menyangkut tentang hukum dan perjanjian ataupun yang menyangkut tentang tanggung jawab, hendaknya dalam membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian, agar supaya diantara kedua belah pihak atau yang bersangkutan tidak merasa dirugikan oleh satu sama lain.

*Kedua*, bagi setiap pihak yang membuat perjanjian atau membuat janji hendaklah menjalankan atau menepati janji yang telah di buatnya karena pada dasarnya isi sebuah perjanjian itu pasti didasari dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, karena jika sesuatu hal apapun itu yang dilakukan dengan dasar itikad baik dan tanggung jawab maka tidak akan terjadi sebuah kesalahan dan tidak akan membuat dirinya untuk melakukan kesalahan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Bale Bandung.
- Singgih, Marzuki Usman dan Ika, Riphath Syahrir. 1997. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti, R. 1994. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

### **Aturan Perundang-undangan**

- Subekti dan Tjitrosudibio, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*.